

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan, pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Berbicara mengenai sistem pendidikan, tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Terdapat banyak faktor yang akan menunjang keberhasilan sebuah pendidikan, tidak terkecuali masalah tentang biaya. Artinya, faktor biaya bukanlah faktor utama keberhasilan sebuah pendidikan akan tetapi biaya dijadikan sebagai penyempurna bagi faktor lainnya. Biaya yang dikeluarkan maupun yang diperoleh, akan efektif dan efisien bila digunakan dengan baik.

Menurut Akdon, berpendapat bahwa biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi, jumlah peserta didik, tingkat gaji guru, yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa berbanding guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduknya (khususnya negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan (*revenue theory of cost*).¹

¹ . Akdon,dkk., *Manajemen Penbiayaan Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017, hal.9.

Pernyataan diatas jelas menggambarkan bahwa biaya pendidikan bukan sesuatu yang mudah untuk menjalankannya, hal itu perlu adanya manajemen yang baik dari berbagai pihak yang bersangkutan, baik dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat sekitar.

Kemudian tanggung jawab terhadap pendanaan pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintahan RI Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 2 yaitu, ” Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.²

Menurut Daryanto mengatakan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi beragam kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan. Mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber biaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan alokasi belanja untuk proses pengajaran, termasuk pengeluaran sekolah untuk gaji dan berbagai pelayanan di setiap jenis sekolah. Dengan kata lain, pembiayaan pendidikan menyangkut sumber-sumber dan alokasi dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Dinamika pendidikan dilihat dari segi pembiayaan pendidikan berhubungan dengan:

a) Jumlah pembiayaan sekolah swasta; b) Penggajian staf pengajaran; c)

²Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 pasal 2, *Tentang Pendanaan Pendidikan*.

Pembiayaan dan penerimaan pendapatan; dan d) Kembalian dari pembiayaan pendidikan yang meningkat.³

Menurut Indriyanto menyatakan bahwa kebijakan pendidikan masih diarahkan pada empat tema kebijakan, yaitu peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi pendidikan.⁴

Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi pembiayaan.

Berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tetap saja biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, pendidikan tanpa didukung biaya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan sesuai harapan. Penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat disangkal

³ Daryanto. *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 1-2.

⁴ Indriyanto, B. (2001), *Sumber Daya Pendidikan : Reaktualisasi Pasal 1 (Ayat 10) Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

lagi. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Disatu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.

Perkembangan dunia dalam bidang pendidikan dengan mudah dapat dikatakan bahwa masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan akan menyangkut masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, pemasaran dan aspek lain yang terkait dengan masalah keuangan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan sekolah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidak mampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan. Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orangtua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran.

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukan karena sekolah harus mampu

menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan fakta di lapangan yang dilakukan mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik, gaji guru, TU sampai menambah/memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk, membiayai kebutuhan sekolah yang lain. Pihak sekolah mengakui bahwa untuk menjalankan itu semua para orang tua diharapkan dapat berpartisipasi dalam melaksanakan tujuan sekolah yang dalam hal ini adalah masalah pembiayaan. Terlebih di sekolah swasta, meskipun sudah mendapat dana BOS namun untuk menunjang operasional yang lain orang tua tetap memberikan dana tiap bulannya (SPP).

Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dan negeri sangatlah berbeda. Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Jabal Nuur merupakan salah satu madrasah yang terletak di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Meski lokasi madrasah ini berada di pedesaan, madrasah ini telah berhasil mengakreditasi lembagannya dengan Akreditasi A, adapun pendidik yang berada di MTs tersebut harus bergelar minimal S1. Lembaga ini, setiap malam Ahad Pon dan ahad wage selalu mengadakan rutinan sholat Tahajud berjamaah dan diikuti oleh seluruh siswa siswi dan pendidik yang berada di Madrasah dan masyarakat sekitar.

Terdapat beberapa dampak positif dan dampak negative dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Jabal Nuur ini, diantara dampak positifnya adalah kurang lebih 80% kebutuhan di madrasah terpenuhi, pengelola pembiayaan tertata dengan baik, kerjasama antara bendahara Madrasah dengan bendahara yayasan terjalin dengan baik, dan setiap tahun selalu tersisa dana yang nantinya dialokasikan untuk work shop maupun studi banding, serta dalam proses pembangunan fasilitas yang berada di MTs, pihak yayasan tidak pernah meminta sumbangan dari wali murid siswa. Dari segi dampak negatifnya ialah anggaran yang dikeluarkan mengalami pembengkakan, tidak sesuai dengan RAPBM yang telah direncanakan, sehingga pengelola mensiasatinya dengan cara melebihi anggaran RAPBM lebih dari semestinya, pemasukan dana tergantung pada jumlah siswa, sedangkan beberapa persen siswa dalam madrasah tersebut notabennya dari segi ekonomi menengah kebawah, sehingga pemasukan dana kurang maksimal, dan tersumbat, ketika melakukan pelunasan Syahriyah terdapat beberapa siswa yang tidak melakukan administrasi tersebut dengan berbagai alasan tertentu, sehingga guna untuk melunasinya diambilkan dari BSM yang telah diterima siswa.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di MTs. SA Jabal Nuur Duwet Wates Kediri Sehingga dalam hal ini, penulis

⁵ Desi Anekel, Wawancara, pada 16 Juli 2020

mengajukan judul penelitian, yaitu Manajemen Pembiayaan Pendidikan Sekolah Swasta (di MTs. SA Jabal Nuur).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah dari masalah yang masih bersifat umum.⁶ Dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini dapat penulis tentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan sekolah swasta di MTs. SA Jabal Nuur ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan sekolah swasta di MTs. SA Jabal Nuur ?
3. Bagaimana pengawasan/ kontroling pembiayaan pendidikan sekolah swasta di MTs. SA Jabal Nuur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengindikasikan maksud penelitian, dan bukan masalah atau isu yang dapat menuntun pada keharusan diadakannya penelitian, tujuan penelitian bukanlah rumusan masalah yang didalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang nantinya dijawab berdasarkan data-data penelitian yang telah dikumpulkan. Akan tetapi tujuan penelitian adalah

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 286.

kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.

Gagasan ini dibangun berdasarkan suatu kebutuhan (masalah penelitian) dan diperhalus kembali dalam pernyataan yang spesifik (rumusan masalah). Tujuan penelitian akan menggambarkan tujuan-tujuan /maksud dilakukannya penelitian. Begitu pentingnya tujuan penelitian ini, sehingga peneliti perlu menuliskan secara terpisah dari aspek- aspek lain yang perlu mbingkainya dalam satu kalimat yang mudah dipahami.

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendiskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs. SA Jabal Nuur.
2. Mendiskripsikan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs. SA Jabal Nuur.
3. Mendiskripsikan pengawasan / kontroling pembiayaan pendidikan MTs. SA Jabal Nuur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu pendidikan, khususnya mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia yang ideal untuk sekolah dasar.
- b. Memberikan konsep tentang pembiayaan pendidikan di MTs yang ideal.

- c. Memberikan tuntunan dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan di sekolah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai tambahan wawasan serta pengawasan penggunaan anggaran pendidikan pada madrasah untuk mendorong peningkatan mutu peserta didik.

b. Bagi Guru

Dengan adanya penelitian ini para guru diharapkan mampu menambah pengetahuan dan perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian pembiayaan pendidikan MTs. SA Jabal Nuur .

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan desain penelitian selanjutnya yang relevan dengan pendekatan yang variatif.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai perbandingan terhadap penelitian yang

dilakukan. Dalam skripsi ini penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penulis antara lain:

- a. Menurut Nur Fauziyah dalam skripsinya membahas tentang perencanaan berupa kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan siswa, guru, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Pengadaan sumber keuangan dan pengalokasian anggaran dilakukan secara transparan oleh SMP Boarding School Putra Harapan Kober Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

Pelaksanaan anggaran, pembukuan serta penanggung jawaban keuangan sekolah dilakukan oleh bendahara sesuai dengan pedoman yang dimiliki, dan dilakukan setiap hari, triwulan, dan pertahun. Adanya pengawasan dilakukan oleh lembaga sasaran pengawasan menekankan kepada kas, yaitu untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan dengan uang yang seharusnya ada dalam catatan.⁷

- b. Muhamad Anis dalam skripsinya membahas tentang manajemen pembiayaan pendidikan di SD IT Assalamah Ungaran dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembiayaan pendidikan meskipun ada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung manajemen pembiayaan pendidikan di SD IT

⁷ Nur Fauziyah, *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Boarding School Putra Harapan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas*, (Skripsi IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2016), hal. vii.

Assalamah Ungaran. Penelitian ini menyarankan bagi sekolah agar dapat mempertahankan pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif, efisien, dan transparan. Bagi UPTD pendidikan, diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah.⁸

- c. Dini Arfian dalam skripsinya membahas tentang: (1) Proses penganggaran pembiayaan yang dilakukan di SMP NU 07 Brangsong Kendal melalui beberapa tahap yaitu mulai dari mengadakan rapat pleno sekolah, mengidentifikasi rencana penerimaan sekolah, mengidentifikasi rencana pengeluaran sekolah, mengkonsultasikan RAPBS dengan komite sekolah sampai dengan pengesahan RAPBS. Dalam penganggaran pembiayaan juga sudah menganut prinsip efektif dan efisien dikatakan efektif karena Dilihat dari RAPBS tahun ajaran 2013/2014 SMP NU 07 Brangsong telah menganggarkan pengeluaran untuk program pendidikan sebesar Rp. 322.361.000. atau 49 % jumlah itu lebih besar dari pengeluaran untuk non program sekolah yang sebesar 42 % dan belanja lain-

⁸ Muhamad Anis, Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD IT Assalamah Ungaran, (Skripsi Universitas Negeri Semarang: tidak diterbitkan, 2013), hal. vii.

lain sebesar 9%. Penganggaran itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah yang fokus untuk mengembangkan pendidikan didalamnya. Dikatakan efisien karena dengan mengalokasikan dana sebesar 49 % bagi program pendidikan sekolah dapat menekan biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa untuk menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas yang dibuktikan dengan akreditasi sekolah berpredikat A dan juga pemberian keterampilan dalam program ekstrakurikuler yang telah mendapat piagam penghargaan dalam lomba-lomba yang diikuti. (2) Proses pencatatan keuangan di SMP NU 07 Brangsong Kendala dilakukan dengan menggunakan beberapa catatan keuangan seperti buku kas umum, buku pembantu kas, buku penerimaan gaji, buku penerimaan gaji ekstrakurikuler, buku pembantu bank, serta laporan keuangan. Pembukuan tersebut juga menjadi penting karena setiap pembukuan yang dilakukan mempunyai fungsi akuntansi sendiri dalam proses keuangan sekolah. (3) Pengawasan keuangan yang dilakukan di SMP NU 07 Brangsong Kendal berasal dari pengawas internal yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dan pengawas eksternal yang dilaksanakan oleh komite sekolah